PENGARUH OPINI AUDIT, TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Negeri Islam Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

SHERLY APRINA LOVIKA
NIM. 16.52.21.101

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
2020

PENGARUH OPINI AUDIT, TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

SHERLY APRINA LOVIKA
16.52.21.101

Surakarta, 26 November 2020

Disetuji dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Anim Rahmayati, M.Si
NIP.19841008 201403 2 005

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	: SHERLY APRINA LOVIKA
NIM	: 16.52.21.101
PROGRAM STUDI	: AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"PENGARUH OPINI AUDIT, TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019)"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta,26 November 2020

Sherly Aprina Lovika

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	: SHERLY APRINA LOVIKA
NIM	: 16.52.21.101
PROGRAM STUDI	: AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian saya yang berjudul "**PENGARUH OPINI AUDIT, TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019)**".

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan mengambil data dan pebgambilan. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 26 November 2020

Sherly Aprina Lovika

Anim Rahmayati, M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS
Hal : Skripsi
Sdr : Sherly Aprina Lovika

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ika Yhuni Pratiwi NIM: 16.52.21.101 yang berjudul:

PENGARUH OPINI AUDIT, TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019)

Sudah dapat dimunaqasah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.Akun.) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqasah dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 November 2020
Dosen Pembimbing Skripsi

Anim Rahmayati, M.Si
NIP. 19841008 201403 2 005

PENGESAHAN

PENGARUH OPINI AUDIT, TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019)

Oleh:

SHERLY APRINA LOVIKA
NIM. 16.52.21.101

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah
Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020/ 6 Jumadil Awal 1442 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji:

Penguji I
Fahri Ali Ahzar, M.Si. (Merangkap Ketua Sidang)
NIK 19910513 201701 1 124

Penguji II
Samsul Rosadi, M.Si.
NIK 19871221 201701 1 165

Penguji III
Dita Andraeny, SE, M.Si.
NIP 19880628 201403 2 005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Surakarta

Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E, M.Si
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka."

(Q.S. Ar Ra'du : 11)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

(QS. Al-insyiraah 5-8)

"Pemikiran adalah bayangan dari perasaan kita selalu lebih gelap, lebih kosong, dan lebih sederhana."

(Friedrich Nietzsche)

PERSEMBAHAN

"BERI CINTA PADA PROSES KERJA KERASMU"
- SHERLYAL

Alhamdulillahi rabbil 'aalamiin

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk:

Bapak dan Ibu tercinta, Suprianto dan Sunarti yang selalu mendukung dengan cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah dicurahkan selama ini

Adikku tersayang Keyla Radisty Putri

Teater Sirat IAIN Surakarta

Sahabat terkasihku (Ika, Evi, Nira, Siti, Monica)

Almamater IAIN Surakarta

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Keluarga Besar Akuntansi Syariah C 2016

Yang tanpa lelah memberikan dukungan moril dan materil
Saya ucapkan

Terimakasih…

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Opini Audit, Tingkat Kesejahteraan Dearah, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Situs Web Pemerintah Daerah". Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr, Mudofir, S.Ag, M.Pd, selaku Rektor Intitut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si., selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Staff Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah membantu kelancaran dalam urusan administrasi.
6. Tim Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan masukan.
7. Ibu dan Bapakku, terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan.
8. Adik Keyla Radisty Putri tersayang.
9. Ciwi-Ciwi kesayangan; Ika, Evi, Siti dan Nira, terima kasih atas kebahagiaan yang telah kalian berikan sehingga penulis tidak lagi merasakan kepahitan saat penyusunan skripsi seperti yang orang lain katakan. Terima kasih banyak! Aku sayang kalian!
10. Tim Penolong; Ridha, Hana, Resa dan Anisha. Terima kasih banyak! *Lafyu gengs!*
11. Sahabat Teater Sirat, Kikiy, Desty, Wibby, Anissa, Etik, Lucky, Alya, Okta, Anis, Atin, Vivi, Mbak Santi, Aziz, Akbar, Ismail, Saipul, Dika, Jerry.
12. Almamater IAIN Surakarta yang menjadi tempat dalam menimba ilmu.
13. Teman-teman Akuntansi Syariah 2016 C. Terima kasih atas kerjasamanya selama hampir 4 tahun ini. *See you on top, gaes!*
14. Rekan-rekan KKN Desa Gerdu 2019, yang telah berbagi suka dan duka serta pembelajaran yang tidak penulis dapatkan di bangku perkuliahan selama kegiatan KKN berlangsung. Terima kasih atas satu bulannya yang luar biasa!

Untuk semuanya yang pernah ikut bagian dalam cerita hidup saya. Semuanya saja tanpa saya bisa sebutkan satu-persatu. semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 2020

Penulis

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of audit opinion, the level of regional dependence and the size of the local government on the disclosure of financial statements on the website of the district / city government in Central Java Province. The research method used is a quantitative research method with a population of 35 districts / cities in Central Java in 2016-2019. The sampling technique used in this study is purposive sampling method and the research sample was obtained a number of 26 districts / cities. Meanwhile, the data used the SPSS 23 program.

The test results show that during the study period 2016 to 2019 only the size variable of the local government that has a significant effect on the disclosure of financial statements on the local government website. Meanwhile, the audit opinion variable and the level of community dependency had no significant effect on the disclosure of financial statements on the local government website.

Keywords: disclosure of website, audit opinion, level of regional dependence, size of local government

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini audit, tingkat ketergantungan daerah dan ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan di situsweb pemerintah daerah Kabupaten/kota di Provisi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuanitatif dengan populasi yaitu 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2016-2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sampel penelitian sejumlah 26 kabupaten/kota. Sedangkan oleh data menggunakan program SPSS 23.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa selama periode penelitian tahun 2016 sampai 2019 hanya variabel ukuran pemerintah daerah yang berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di situsweb pemerintah daerah. Sedangkan variabel opini audit dan tingkat ketergantungan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di situsweb pemerintah daerah.

Kata Kunci : pengungkapan lkpd situsweb, opini audit, tingkat ketergantungan daerah, ukuran pemerintah daerah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI iii

HALAMAN PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN iv

HALAMAN NOTA DINAS v

HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASAH vi

HALAMAN MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

ABSTRACT xii

ABSTRAK xiii

DAFTAR ISI xiv

DAFTAR TABEL xviii

DAFTAR GAMBAR xix

DAFTAR LAMPIRAN xx

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah 1

1.2.Identifikasi Masalah 6

1.3.Batasan Masalah 7

1.4.Rumusan Masalah 7

1.5.Tujuan Penelitian 7

1.6.Manfaat Penelitian 8

1.7.Jadwal Penelitian 9

1.8.Sistematika Penulisan Skripsi 9

BAB II LANDASAN TEORI

2.1.Kajian Teori 11

2.1.1. Teori Agensi *(Agency Theory)* 11

2.1.2. Teori Organisasi Pembelajaran *(Learning Organization Theory*)..... 12

2.1.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 13

2.1.4. Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Situsweb Pemda..... 14

2.1.5. Opini Audit..... 17

2.1.6. Tingkat Ketergantungan Daerah..... 18

2.1.7. Ukuran Pemerintah Daerah 19

2.2.Hasil Penelitian Relevan 21

2.3.Kerangka Berfikir..... 26

2.4.Hipotesis..... 27

2.4.1. Pengaruh Opini Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Situsweb Pemda..... 27

2.4.2. Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Pemda terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Situsweb Pemda 28

2.4.3. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Situsweb Pemda 29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.Waktu dan Wilayah Penelitian 31

3.2.Jenis Penelitian..... 31

3.3.Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 31
3.3.1. Populasi 31
3.3.2. Sampel 32
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 32
3.4.Data dan Sumber Data 33
3.5.Teknik Pengumpulan Data 34
3.6.Variabel Penelitian 33
3.6.1. Variabel Dependen 34
3.6.2. Variabel Independen 34
3.7.Definisi Operasional Variabel 34
3.7.1. Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Situsweb Pemda 34
3.7.2. Opini Audit 35
3.7.3. Tingkat Ketergantungan Daerah 36
3.7.4. Ukuran Pemerintah Daerah 37
3.8.Teknik Analisis Data 37
3.8.1. Statistik Deskriptif 37
3.8.2. Uji *Goodness of Fit.* 37
3.8.3. Uji Kelayakan Keseluruhan Model *(Overall Fit Model Test)* 37
3.8.4. Uji Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R2)* 38
3.8.5. Analisis Regresi Logistik 39
3.8.6. Uji Hipotesis 40
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
4.1.Gambaran Umum Penelitian 41

4.2.Pengujian dan Analisis Data 42
4.2.1. Analisis Hasil Statistik Deskriptif 42
4.2.2. Uji *Goodness of Fit.* 45
4.2.3. Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test)* 46
4.2.4. Uji Koefisien Determinasi *(Nagellkerke's R Square*) 47
4.2.5. Analisis Regresi Logistik 48
4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis) 51
BAB V PENUTUP
5.1.Kesimpulan 55
5.2.Keterbatasan Penelitian 55
5.3.Saran 56
DAFTAR PUSTAKA 57
LAMPIRAN 60

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Hasil Penentuan Sampel.....32

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....44

Tabel 4.3 Hasil Uji *Goodness of Fit* 46

Tabel 4.4 Hasil Uji -*2 log* likehoood awal (*block number* = 0) 47

Tabel 4.5 Hasil Uji -*2 log* likehoood akhir (block *number* = 1) 48

Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi 49

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Logistik.....51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian 65

Lampiran 2 Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 66

Lampiran 3 Hasil Tabulasi Data 67

Lampiran 4 Hasil Analisis Data 70

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup 73

Lampiran 6 Cek Plagiat 74

BAB I
PENDAHULUAN

1.2. Latar Belakang Masalah

Pengembangan teknologi informasi telah sangat mengubah kehidupan kita sehari-hari, termasuk cara warga setempat memperoleh informasi dari pemerintah lokal mereka. Perubahan ini juga mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk menjadi lebih transparan daripada sebelumnya dengan memberikan laporan keuangan mereka di situs web mereka. Situs web ini biasa disebut dengan *e-government*. Pengungkapan informasi baik keuangan maupun non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah dapat membantu pemerintah daerah menyampaikan informasi secara cepat, mudah, dan berbiaya rendah (Nor, Hudaya dan Novriyandana, 2019).

E-Government adalah pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat oleh pemerintah melalui situs internet (Nosihana & Yaya, 2016). Sedangkan menurut Wilopo (2017) *E-Government* yaitu penggunaan internet sebagai salah satu cara menyampaikan informasi publik oleh pemerintah. Di indonesia telah mulai mengembangkan *e-government* sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003.

Tujuan *e-government* adalah untuk memudahkan akses publik terhadap informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah. Instruksi tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk mengembangkan situs web resmi (Nor, Hudaya dan Novriyandana, 2019). Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) No. 65

tahun 2010, Pasal 13 menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk memanfaatkan dan mengembangkan kemajuan teknologi informasi untuk mengirimkan informasi keuangan melalui situs resmi. Namun, peraturan pengungkapan keuangan pemerintah daerah di situs web ini masih bersifat sukarela (Nor, Hudaya dan Novriyandana, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi pada situs web pemertintah daerah. Faktor pertama adalah opini audit. Menurut Prasasti, Rahayu dan Zultilisna (2017) opini audit merupakan informasi yang penting untuk diketahui oleh pengguna informasi, baik pemerintah itu sendiri untuk mengetahui kinerja dan melakukan evaluasi, serta masyarakat dan investor untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, opini audit adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Faktor kedua yaitu tingkat ketergantungan daerah. Tingkat ketergantungan daerah merupakan jenis pendanaan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau provinsi untuk membiayai operasional pemerintah daerah (Idris, Surasni dan Irwan, 2018). Pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi akan meminta pengungkapan yang lebih sebagai upaya untuk memonitoring kinerja atas alokasi dana yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Dana transfer yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada dana alokasi umum (DAU).

Faktor ketiga yaitu ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula peluang kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional dan roda pemerintahan daerah, begitu juga sebaliknya apabila ukuran pemerintah daerah kecil maka dalam pelaksanaan operasional dan roda pemerintahan daerah akan cenderung mengalami kesulitan, karena semakin besar ukuran pemerintah maka dapat memberi kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah (Aziz, 2016 dalam Sari & Mustanda, 2019).

Menurut Handayani (2010) opini audit dapat mempengaruhi publikasi pengungkapan laporan keuangan di situs web pemerintah daerah. Semakin banyak penyimpangan yang ditemukan oleh BPK melalui auditnya, hal itu mungkin akan berdampak pada pengungkapan laporan keuangan mereka. Pemerintah daerah yang memiliki hasil audit buruk cenderung membuat laporan keuangannya tidak tersedia untuk umum. Seperti dari hasil penelitian Nor, Hudaya dan Novriyandana (2019) yang menunjukan bahwa opini audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah.

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah berhubungan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah. Semakin besar Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat, menunjukkan semakin besar pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana lain dalam mendanai belanjanya (Robbins & Austin, 1986). Seperti hasil penelitian dari Martani, Fitriasari dan Annisa (2014) dan Anggara &

Cheisviyanny (2020) Tingkat ketergantungan pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) Ukuran Pemerintah Daerah merupakan variabel untuk mengukur besar atau kecilnya suatu pemerintah daerah. Organisasi yang besar akan lebih cenderung memiliki banyak peraturan dan ketentuan dibanding dengan organisasi kecil.

Pemerintah daerah yang berukuran besar umumnya memilik total aset yang besar. Sehingga total aset yang besar mendorong pemerintah daerah melakukan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di website sebagai bukti telah melakukan kinerja pemerintah yang baik. Seperti hasil penelitian Martani, Fitriasari dan Annisa, (2014) Ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif pada tingkat pengungkapan keuangan dan kinerja di situs web pemerintah daerah Indonesia.

Opini audit yang diberikan oleh BPK menunjukkan angka kewajaran pada LKPD. Jawa Tengah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi hasil opini audit tidak dapat diakses sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui langsung opini terhadap pemerintah daerah tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki situs resmi telah mengungkapkan informasi keuangan, pelayanan dan informasi lainnya dalam situsnya, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengakses situs resmi tersebut (Makmum & Rahayu, 2018).

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai hubungan antara pengaruh opini audit dengan pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Nor, Hudaya dan Novriyandana, (2019) dan Prasasti, Rahayu dan Zultilisna, (2017) menunjukkan opini audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dari Idris, Surasni dan Irwan (2018) dan Saraswati, Budiarti dan Sudibyo (2019) Opini audit tidak berpengaruh pada publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet.

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai hubungan antara pengaruh tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Idris, Surasni dan Irwan (2018) menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Martani, Fitriasari dan Annisa (2014) dan Anggara & Cheisviyanny (2020) menunjukkan hasil tingkat ketergantungan pemerintah daerah memiliki pengaruh positif pada tingkat pengungkapan laporan keuangan di pemerintah daerah.

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai hubungan antara pengaruh ukuran pemerintah daerah dengan pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Martani, Fitriasari dan Annisa (2014) Ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif pada tingkat

pengungkapan keuangan dan kinerja di situs web pemerintah daerah. Sedangkan menurut hasil dari Penelitian yang dilakukan Anggara dan Cheisviyanny (2020) dan Wilopo (2017) ukuran pemerintah daerah tidak berhubungan positif terhadap pengungkapan informasi laporan keuangan pada website pemerintah daerah.

Alasan dipilihnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Jawa Tengah sebagai sampel ialah karena masih adanya penelitian terkait tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah yang hanya fokus terhadap lingkup yang lebih sempit, serta adanya penelitian Hilmi (2010) yang menemukan bahwa pengungkapan tertinggi dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut juga didukung saat peneliti dalam mengumpulkan sampel bahwa dari beberapa Provinsi di Pulau Jawa hanya Provinsi Jawa Tengah yang pemerintah daerahnya banyak mengungkapkan LKPD di situsweb resmi.

Berdasarkan urian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "Pengaruh Opini Audit, Tingkat Ketergantungan Daerah Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Situs Web Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019)".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dapat diidentifikasikan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang hasil opini auditnya tidak dapat di akses oleh masyarakat.
2. Terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian diantara penelitian-penelitian sebelumnya.

1.3. Batasan Masalah

Untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan, maka penulis membatasi bahwa faktor-faktor yang diteliti yaitu opini audit, tingkat ketergantungan daerah dan ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah (studi pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi jawa tengah tahun 2016-2019).

1.4. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang ada sebagai berikut :

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah ?
2. Apakah tingkat ketergantungan daerah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah ?
3. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah ?

1.5. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat ketergantungan daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi Akademisi

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang kajian dalam penelitian ini.

2. Bagi Pemerintah Daerah

   Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan sumbangan pemikiran untuk referensi dan masukan bagi. Pemerintah daerah diharapkan dengan adanya penelitian ini maka pemerintah daerah dapat termotivasi dalam perkembangan dan kegunaan internet. Sehingga pemerintah daerah dapat lebih mengembangkan websitenya untuk meningkatkan publikasi Laporan keuangan pemerintah daerah.

1.7. Jadwal Penelitian

Terlampir

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kajian teori yang mendukung penelitian, hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variable penelitian, definisi operasional variable, instrument penelitian serta teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data, serta pembahasan hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya, keterbatasan dari penelitian serta saran-saran kepada pihak yang perkepentingan terhadap hasil penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agensi menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal dan agen. Dimana masyarakat dianggap menjadi principal dan pemerintah menjadi pihak agen. Sesuai dengan teori keagenan, politisi diansumsikan mencari keuntungan diri sendiri dengan memaksimalkan kepentingannya sebagai agen. Kemampuan para politisi memaksimalkan kekayaannya bergantung pada pemilihan umum, kemajuan, income saat ini dan masa depan, baik itu keuangan maupun non keuangan (Zimmerman, 1977).

Teori keagenan memandang bahwa banyak terjadi asimetri informasi antara pihak pemerintah daerah yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak masyarakat. Adanya asimetri informasi inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh pemerintah daerah (Setiawan, 2012). Ketidaksimetrisan informasi ada ketika terjadi ketidaklengkapan informasi dimana tidak semua pihak mengetahui seluruh keadaan atau informasi.

Sehingga kedua belah pihak tidak dapat mempertimbangkan konsekuensi tertentu dari suatu keputusan atau tindakan yang diambil. Sedangkan konflik kepentingan terjadi akibat perbedaan kepentingan antara agent dan principal,

setiap pihak cenderung untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan adanya alat pemantauan atau monitoring yang bisa dipakai principal agar tindakan agent yang melenceng dari ketentuan awal dapat dicegah maupun diminimalisir.

Masyarakat menginginkan informasi keuangan secara transparan dan akuntabel melaui laporan keuangan yang dipublikasikan melalui situs web pemerintah daerah. Pemerintah daerah menggunakan pihak ketiga yaitu auditor untuk menguji kelayakan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah sehingga dapat meyakinkan publik (Nor, Hudaya dan Novriyandana, 2019).

Hubungan teori agensi dengan penelitian ini adalah masyarakat sebagai principal berhak memilih dan mempercayai pemerintah daerah dengan harapan pemerintah dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah baik dalam kemajuan daerah ataupun pendapatan yang dihasilkan dari daerah tersebut. Pemerintah daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk melaporkan informasi keuangan daerah dalam bentuk laporan keuangan daerah sebagai wujud pertanggungjawaban.

2.1.2. Teori Organisasi Pembelajaran (*Learning Organization Theory*)

Teori organisasi merupakan salah satu konsep dimana organisasi mampu terus menerus melakukan proses belajar mandiri sehingga organisasi tersebut memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam merespon berbagai perubahan yang muncul. Menurut Senge (1990) dalam Nor, Hudaya dan Novriyandana,

2019) Organisasi pembelajar adalah organisasi dimana orang terus-menerus memperluas kapasitas mereka untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan, dimana pola pemikiran baru dibudidayakan, aspirasi kelompok diberi kebebasan, dan dimana orang terus-menerus belajar melihat bersama-sama secara menyeluruh.

Jadi dalam sebuah organisasi yang mempunyai kinerja dan tujuan, didalamnya harus ada hubungan dan proses yang berkelanjutan (*system thinking*) antara anggota satu dengan anggota yang lain atau anggota dengan tim (Senge, 1990 dalam Nor, Hudaya dan Novriyandana, 2019). Hal tersebut sangat berguna atau bermanfaat untuk kemajuan sebuah organisasi itu sendiri.

Secara umum dapat digambarkan bahwa sebagai sebuah organisasi, pemerintah daerah perlu mengikuti perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai organisasi perlu terus merespon berbagai perubahan yang muncul, salah satunya kebutuhan akan akses informasi yang cepat, terjangkau dan mudah. Dengan akses informasi yang cepat pemerintah daerah akan lebih mudah dalam mempublikasikan laporan keuangan pada situs web resmi pemerintah daerah tersebut (Nor, Hudaya dan Novriyandana, 2019).

2.1.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu (Ivana, 2018). Untuk menyusun

LKPD ini, Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) menerapkan SAP Berbasis Akrual dalam menyusun dan menyajikan LKPD.

SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Lampiran I. 01 pada paragraf 28-29, komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pokok terdiri dari : 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) 3. Neraca 4. Laporan Operasional (LO) 5. Laporan Arus Kas (LAK) 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 7. Catatan atas laporan keuangan (CaLK).

DPRD selaku wakil rakyat yang diserahi untuk melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, wajib memberikan penilaian atas laporan keuangan yang disampaikan kepala daerah. Penilaian dilakukan berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan (IHP) BPK-RI, tentunya untuk menilai tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, ketaatan terhadap standar akuntansi, penilaian terhadap tingkat ekonomi dan efisiensi penggunaan anggaran (APBD) atau kinerja organisasi.

2.1.4. Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Situsweb Pemerintah Daerah

Menurut Nor, Hudaya dan Novriyandana (2019) pengungkapan laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui internet adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat yang paling murah, cepat dan efisien. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur tantang transparansi oleh pemerintah daerah kepada masyarakat masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang tidak melaporkan informasi keuangan secara lengkap dalam website resminya.

Perkembangan teknologi dan sistem informasi juga mempengaruhi sistem pemerintahan di Indonesia. Saat ini, berbagai kegiatan manajemen keuangan baik di pusat maupun di pemerintah daerah telah didukung oleh sistem teknologi yang memadai. Tujuannya adalah agar laporan keuangan pemerintah dilaporkan tepat waktu. Selain dapat menyajikan laporan keuangan tepat waktu, teknologi dan informasi adalah cara bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan lokal (Nor, Hudaya dan Novriyandana, 2019).

Teknologi seperti internet dapat digunakan untuk melaporkan laporan keuangan. Sejalan dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa badan publik harus terbuka dan bertanggung jawab atas informasi publik apapun (Nor, Hudaya dan Novriyandana, 2019). Tingkat pengungkapan informasi berkaitan dengan seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan, baik kepada pihak internal maupun eksternal. Pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu bentuk pengungkapan dan pelaksanaan dari e-government di Indonesia (Prasasti, Rahayu dan Zultilisna, (2017).

Pengungkapan (*disclosure*) secara konseptual merupakan bagian keseluruhan dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Tingkat pengungkapan informasi berkaitan dengan seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan, baik kepada pihak internal maupun eksternal. Pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu bentuk pengungkapan dan pelaksanaan dari *e-government* di Indonesia (Prasasti, Rahayu dan Zultilisna, 2017).

Suatu cara yang paling baik dan efektif bagi pemerintah untuk menyebarkan informasinya pada masa kini adalah dengan melalui media internet yaitu dengan mempublikasikan informasi laporan keuangannya melalui website pemerintahan daerah (Styles dan Tennyson, 2007:58 dalam Pardosi, 2018). Adapun beberapa keuntungan yang dapat diperoleh bagi pemerintahan daerah dalam mengungkapkan informasi keuangannya pada website pemerintahan daerah yaitu media internet.

Media internet menawarkan biaya yang rendah bagi pengguna dan penyedia informasi, internet dapat diakses dimana saja dan kapan saja sehingga cenderung tidak memiliki batasan bagi para pengguna dan penyedia informasi, dan informasi yang diungkapkan dapat disajikan dengan berbagai macam bentuk sehingga memudahkan dalam penggunaannya (Ivana, 2018).

2.1.5. Opini Audit

Opini audit adalah informasi yang penting untuk diketahui oleh pengguna informasi, baik pemerintah itu sendiri untuk mengetahui kinerja dan melakukan evaluasi, serta masyarakat dan juga investor untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah (Makmum & Rahayu, 2018). Hasil kinerja pemerintah juga terdapat dalam laporan keuangannya, setiap akhir periode akuntansi pemerintah diwajibkan menyerahkan laporan keuangan kepada auditor independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Nosihana & Yaya, 2016).

Dalam UU No. 15 tahun 2004 bahwa opini yang dibuat BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan empat kriteria Standar Akuntansi Pemerintah / Kepatuhan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan peraturan dan efektivitas sistem kontrol internal (Nor, Hudaya dan Novriyandana, 2019).

Opini audit merupakan salah satu indikator akuntabilitas terhadap sebuah laporan keuangan. Opini audit diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang menunjukkan tingkat kewajaran terhadap suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Nor, Hudaya dan Novriyandana, 2019).

Pengukuran variabel dilihat dari skala 1 sampai 5 dengan melihat opini audit “ 1. Untuk opini tidak memberikan pendapat (TMP), 2. Untuk opini Tidak Wajar (TW), 3. Untuk opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 4. Untuk opini

Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP), DAN 5. Untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Nor et al., 2019).

Pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP atas LKPDnya cenderung melakukan publikasi laporan keuangan melalui website untuk menunjukkan sinyal kualitas pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, pemerintah daerah yang memperoleh opini audit selain WTP dapat menimbulkan persepsi akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah cenderung menutupi informasi laporan keuangannya. Penelitian (Nor et al., 2019) yang menyatakan bahwa opini audit memiliki pengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di website.

2.1.6. Tingkat Ketergantungan Daerah

Menurut Patrick (2007) Tingkat Ketergantungan Daerah adalah jenis pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat atau provinsi kepada pemerintah derah untuk membiayai operasional pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan yang tinggi cenderung meningkatkan pengungkapannya. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan bagi pemerintah pusat atau provinsi untuk memantau / monitoring apa yang dilakukan pemerintah daerah dan tingkat kinerja atas alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dana perimbangan adalah dana

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan operasional daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdri atas: (1) Dana Alokasi Umum; (2) Dana Alokasi Khusus; dan (3) Dana Bagi Hasil.

Di dalam konteks manajemen keuangan Indonesia, pemerintah daerah umumnya menerima dana dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam teori institusional, semakin besar bantuan DAU yang diterima oleh pemerintah daerah, semakin besar kecenderungan pemerintah daerah untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas pada situs publik (Ratmono, 2013). Penelitian Martani, Fitriasari dan Annisa (2014) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan daerah memiliki pengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di website.

2.1.7. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran organisasi (*size*) merupakan salah satu elemen dari struktur organisasi. Ukuran organisasi menunjukkan seberapa besar suatu organisasi tersebut. Organisasi besar lebih cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011:32 dalam Ivana, 2018). Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan (Setyaningrum, 2012:157).

Suatu pemerintah yang berukuran besar memiliki jumlah dan kekayaan yang besar pula, sehingga pemerintah akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar. Pemerintah yang besar juga lebih kompleks dalam pengelolaan keuangannya, sehingga semakin banyak informasi keuangan yang harus dilaporkan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi. Pengawasan dan kebutuhan pelaporan yang lebih besar oleh pemerintah yang berukuran besar, menyebabkan pemerintah harus menanggung biaya pengawasan dan biaya pelaporan yang lebih tinggi (Yanuaraisya, 2016).

Internet merupakan media yang paling efektif bagi pemerintah daerah dalam mempublikasikan laporan keuangan dalam rangka pelaksanaan transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Melalui internet, pememerintah daerah dapat memberikan informasi keuangan secara cepat, rinci, dan biaya yang ringan.

Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar pemerintahan daerah. Dengan jumlah aset, pegawai dan produktifitas yang lebih besar sehingga diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada daerah yang lebih kecil (Sari dan Rofika, 2016). Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas.

Pemerintahan daerah yang berukuran besar umumnya memiliki jumlah aset yang besar, sehingga pemerintahan daerah akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar dari berbagai pihak salah satunya masyarakat. Ukuran

pemerintah daerah dilihat dari total aset yang dimiliki. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Martani, Fitriasari dan Annisa (2014) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah.

1. Penelitian oleh Martani , Fitriasari dan Annisa tahun 2014

   Martani, Fitriasari dan Annisa, (2014) melakukan penelitian yang berjudul "*Financial and Performance Transparency on The Local Government Websites in Indonesia*" .Dengan jumlah sampel sebesar 429 dari total 491 situs web. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan keuangan dan kinerja di situs web pemerintah daerah Indonesia. Variabel independennya adalah ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat, jenis pemerintah daerah dan tingkat pengganggguran. Penelitian ini menggunakan metode analisis uji regresi berganda.

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh

positif pada tingkat pengungkapan keuangan dan kinerja di situs web pemerintah daerah Indonesia. Sedangkan jenis pemerintah daerah dan tingkat pengganggguran tidak memiliki pengaruh positif pada tingkat pengungkapan keuangan dan kinerja di situs web pemerintah daerah indonesia.

2. Penelitian oleh Prasasti, Rahayu, Zultilisna 2017

Prasasti, Rahayu dan Zultilisna (2017) melakukan penelitian yang berjudul "Opini Audit,Tingkat Kemandirian, Dan Tipe Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi". Dengan jumlah sampel sebesar 25 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengahn tahun 2014-2015. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah . Variabel independennya adalah opini audit, tingkat kemandirian, dan tipe pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan regresi berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit, tingkat kemandirian, dan tipe pemerintah daerah memiliki pengaruh secara simultan terhadap tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Secara parsial, opini audit dan tipe pemerintah daerah yang memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah di provinsi jawa tengah. tingkat kemandirian tidak memiliki pengaruh secara parsial.

3. Penelitian oleh Wilopo 2017

Wilopo (2017) melakukan penelitian yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website". Dengan jumlah sampel sebesar 211 pemerintah daerah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan informasi laporan keuangan yang transparan melalui website pemerintah daerah. Variabel independennya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat, pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, kompleksitas pemerintahaan, belanja daerah, rasio pembiayaan utang, kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dan regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat berhubungan positif dan signifikan terhadap pengungkapan informasi laporan keuangan yang transparan melalui website pemerintah daerah. Sedangkan faktor yang lain tidak menunjukan dampak yang signifikan.

4. Penelitian dari Idris, Surasni dan Irwan 2018

Idris, Surasni dan Irwan (2018) melakukan penelitian yang berjudul "*The Determinant Disclosure of Internet Financial Reporting Distric and City Government in Indonesia*". Dengan jumlah sampel sebesar 152 orang dari pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan internet financial reporting. Variabel independennya adalah kapasitas pemerintah

daerah, leverage, tingkat ketergantungan daerah, opini audit bpk, jenis pemerintah daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah jenis pemerintah daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan internet financial reporting. Sedangkan kapasitas pemerintah daerah, leverage, tingkat ketergantungan daerah, opini audit BPK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan internet financial reporting.

5. Penelitian dari Nor, Hudaya dan Novriyandana 2019

Nor, Hudaya dan Novriyandana (2019) melakukan penelitian yang berjudul "*Financial Statements Disclosure on Indonesia Local Government Website*". Dengan jumlah sampel sebesar 68 laporan keuangan selama periode 2015-2016 yang dikumpulkan dari 34 pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah. Variabel independennya adalah opini audit, temuan audit, tindak lanjut audit, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, komitmen kepala pemerintah daerah. Dengan menggunakan metode regresi logistic.

Hasil dari penelitian ini adalah Opini audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah. Sedangkan temuan audit, tindak lanjut audit, tingkat pendidikan, tingkat

kesejahteraan, komitmen kepala pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah.

6. Penelitian dari Saraswati, Budiarti dan Sudibyo 2019

   Saraswati, Budiarti dan Sudibyo (2019) melakukan penelitian yang berjudul "Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Internet Dan Faktor Yang Memengaruhinya". Dengan sampel sebesar 113 pemerintah daerah kabupaten di Pulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Variabel independennya adalah opini audit, keberadaan situs web LPSE, pengeluaran daerah dan pendapatan per kapita.

   Hasil penelitian ini adalah Pengeluaran daerah dan Pendapatan per kapita mempengaruhi Publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Sedangkan Opini audit dan Keberadaan situs web LPSE tidak berpengaruh pada publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet.

7. Penelitian dari Anggara dan Cheisviyanny 2020

   Anggara dan Cheisviyanny (2020) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". Dengan sampel seluruh kabupaten/kota di Provinsi sumatera barat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan laporan keuangan di

pemerintah daerah. Variabel independennya adalah pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah.

Hasil dari penelitian ini adalah tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di pemerintah daerah. sementara itu, pendapatan asli daerah, temuan audit dan ukuran pemerintah daerah tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan.

2.3. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir menunjukkan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah dan tiga variabel indepeden yaitu opini audit (X1), tingkat ketergantungan pemerintah daerah (X2), ukuran pemerintah daerah (X3). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana gambar berikut ini:

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir

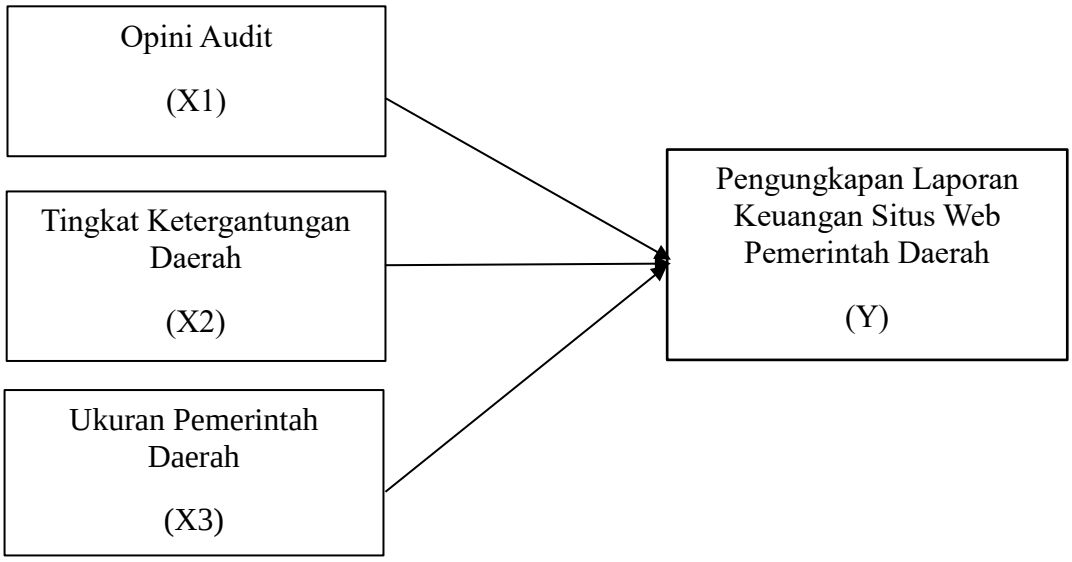

2.4. Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Opini Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Situs Web Pemerintah Daerah

Laporan profesional auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dikenal dengan istilah opini audit. Penyajian laporan keuangan yang akuntabel adalah salah satu indikator kinerja pemerintah daerah yang baik. Menurut BPK (2017) ada lima jenis opini audit: tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat dengan menjelaskan paragraf, berkualitas, merugikan, dan penolakan.

Pemerintah daerah memperoleh opini audit yang kurang kredibel seperti dengan tidak memenuhi syarat dalam menjelaskan paragraf, memenuhi kualitas,

cenderung menutupi laporan keuangan mereka. Sementara pemerintah daerah mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian (yang baik) berperilaku sebaliknya, membuat laporan keuangan tersedia untuk umum (Nor, Hudaya dan Novriyandana, 2019).

Hasil penelitian dari (Nor, Hudaya dan Novriyandana, 2019) dan (Prasasti, Rahayu dan Zultilisna, 2017) menemukan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah.

H1 : Opini audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah.

2.4.2. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Situs Web Pemerintah Daerah

Patrick (2007) mendefinisikan tingkat ketergantungan daerah adalah jenis pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Robbins dan Austin (1986) menemukan bahwa tingkat ketergantungan daerah berhubungan positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin besar Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat, menunjukkan semakin tinggi tingkat informasi pengungkapan di situs webnya.

Dalam konteks manajemen keuangan Indonesia, pemerintah daerah umumnya menerima dana dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atas dana transfer

yang diterima dari pemerintah pusat. DAU harus dipertanggungjawabkan, baik ke masyarakat lokal maupun ke pusat, karena DAU berasal dari APBN.

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh tingkat ketergantungan daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah. Hasil penelitian dari Martani, Fitriasari dan Annisa, (2014) dan Anggara & Cheisvivanny (2020) menemukan bahwa tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah.

H2 : Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah.

2.4.3. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Situs Web Pemerintah Daerah

Ukuran Pemda maksudnya adalah mengenai jumlah aset yang dimiliki dan ditangani oleh Pemda (Wilopo, 2017). Semakin besar aset yang dimiliki suatu daerah menandakan semakin besar juga ukuran Pemda tersebut. Aset dapat mewakili seberapa besar pemerintahan, semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam. Maka dari itu ukuran pemda yang besar mengindikasikan terdapat jumlah kekayaan yang besar pula, pengawasan dari masyarakat akan kegiatan pemerintah akan semakin ketat pula karena terdapat kekhawatiran adanya penyelewengan dana yang mungkin saja terjadi (Nosihana & Yaya, 2016).

Daerah yang memiliki jumlah penduduk yang besar akan mengalami pengawasan publik yang besar serta *stakeholder* yang lebih beragam. Para pemangku kepentingan yang beragam ini memiliki kebutuhan infromasi yang beragam pula. Oleh karena itu besarnya tanggungjawab pelayanan yang diberikan, serta besarnya tekanan permintaan atas informasi pelaksanaan pemerintah, maka pemda yang memiliki ukuran yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak.

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh tingkat ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah. Hasil penelitian Martani, Fitriasari dan Annisa (2014) menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah.

H3 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di *website* Pemerintah Daerah. Objek dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dimulai dari tahun 2016-2019. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah. Penelitian ini dilaksanakan pada Februari 2020 sampai selesai.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017:23).

3.3. Populasi, Sample, Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua situs resmi pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Ada 26 Kabupaten dan 6 kota dalam populasi ini. Tahun yang dijadikan dalam pengambilan data yaitu tahun anggaran 2016-2019.

3.3.2. Sampel

Tabel 3.1 berikut merupakan rangkuman hasil perolehan sampel hingga terpilih 23 kabupaten/kota yang memenuhi kriteria sebagai sempel penelitian ini.

Tabel 3.1
Perolehan Sampel Penelitian Kabupaten dan Kota

Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	35
Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi kriteria	(9)
Total Sampel	26
Total Unit Analisis (Total pemda selama 4 tahun)	104

Sumber : data diolah, 2020

Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi kriteria disebabkan oleh tidak tersediannya publikasi 1 jenis pun laporan keuangan dalam *website* mereka sesuai tahun yang diteliti 2016-2019. Jika terdapat laporan keuangan yang dipublikasi halaman untuk pengunduhan error atau tidak dapat diakses. Dan mayoritas pemda yang tidak memenuhi kriteria hanya sebatas mempublikasikan terkait peraturan-peraturan, berita-berita dan APBD serta perubahannya.

3.3.4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu metode yang digunakan dalam mengambil sampel dari populasi dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah yang memiliki *website* resmi yang masih aktif
2. Pemerintah kabupaten/kota yang dijadikan sampel harus mempublikasikan LKPD yang telah diaudit oleh BPK melalui website masing-masing pemda dalam kurun waktu 2016-2019.
3. Daftar publikasi Laporan Keuangan mengacu pada PP No.71 Tahun 2010.

3.4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sumber datanya didapatkan secara tidak langsung ke pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah dalam periode 2016-2019 yang dipublikasikan di *website* resmi masing-masing pemda sesuai PP No. 71 tahun 2010.

Sumber data dari penelitian ini yaitu dari : *Website* Kemendagri (https://www.kemendagri.go.id/), *Website* resmi pemerintah kabupaten dan kota, *Website* Departemen Keuangan (http://www.djpk.kemenkeu.go.id/), dan *Website* BPK-RI (https://www.bpk.go.id/).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh peneliti dengan metode dokumentasi yaitu dengan menggunakan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada yaitu dari lembaga yang mengeluarkan data tersebut dan juga melalui internet atau website resmi.

3.6. Variabel Penelitian

3.6.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pengungkapan Laporan Keuangan Situs Web Pemerintah Daerah.

3.6.2. Variabel Independen (X)

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah variabel opini audit, tingkat ketergantungan daerah, ukuran pemerintah daerah.

3.7. Definisi Operasional Penelitian

Berikut ini definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Pengungkapan Laporan Keuangan Di Situs Web Pemerintah Daerah

   UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa “setiap entitas publik harus memanfaatkan dan

mengembangkan teknologi informasi untuk menyampaikan informasi kepada publik secara publik". Selain itu, Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah menyatakan bahwa "pemerintah daerah harus menyerahkan keuangan informasi melalui situs web resmi".

Pengukuran publikasi laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini mengikuti penelitian oleh Nor, Hudaya dan Novriyandana (2019) menggunakan variabel biner atau dummy. Nilai 1 jika 7 bagian LKPD terdapat pada website pemerintah daerah dan nilai 0 jika komponen LKPD yang terdapat pada website pemerintah daerah dipublikasikan kurang dari 7 kompononen.

2. Opini Audit

Opini audit diperoleh dari hasil opini yang diterbitkan oleh BPK atas laporan keuangan Pemda tahun 2013. Opini audit dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan ukuran yang sama dengan penelitian Nor, Hudaya dan Novriyandana (2019) yaitu dengan menggunakan pengukuran variabel dilihat dari skala 1 sampai 5 dengan melihat opini audit " 1. Untuk opini tidak memberikan pendapat (TMP), 2. Untuk opini Tidak Wajar (TW), 3. Untuk opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 4. Untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP), DAN 5. Untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

TMP = 1 ; TW =2 ; WDP = 3 ; WTP DPP = 4 ; WTP = 5

3. Tingkat Ketergantungan Dearah

Menurut Martani, Fitriasari dan Annisa (2014) Di Indonesia pemerintah pusat menyediakan dana dalam bentuk Dana Alokasi Umum untuk semua pemerintah daerah dengan jumlah bervariasi. Dengan adanya dana alokasi ini, pemerintah pusat akan memantau semua program kegiatan yang dilakukan permerintah daerah dan tingkat manajemen pencapaian dengan alokasi Dana Alokasi Umum. Tingkat ketergantungan daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan ukuran yang sama dengan penelitian Idris, Surasni dan Irwan (2018) yaitu total DAU dibagi dengan total pendapatan daerah sebagai berikut :

$$Tingkat\ Ketergantugan\ Daerah = \frac{DAU}{Total\ pendapatan\ daerah}$$

4. Ukuran Pemerintah Daerah

Size adalah suatu nominal yang dapat mendeskripsikan sesuatu. Ukuran organisasi menunjukkan besar kecilnya organisasi tersebut begitu pula ukuran pemerintah daerah juga menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah tersebut (Kusumawardani, 2012). Ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan ukuran yang sama dengan penelitian Wilopo (2017) yaitu sebagai berikut :

$$Ukuran\ Pemerintah\ Daerah = Ln\ Total\ Aset$$

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis kuantitatif. Analisis ini menggunakan pendekatan analisis dengan perhitungan matematika. atau statistik dengan bantuan program pengolah data SPSS 23. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini yaitu:

3.8.1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan namun tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penyajian data dalam statistik deskriptif yaitu melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase (Sugiyono, 2017).

3.8.2. Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)

Penilaian model regeresi menggunakan uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis apakah data empiris yang digunakan cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Hipotesis untuk menilai model fit adalah:

H0 : Model yang dihipotesakan fit dengan data

H1 : Model yang dihipotesakan tidak fit dengan data

Jika nilai *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test* lebih dari 0.05, maka hipotesis diterima artinya model ini mampu menjelaskan nilai observasinya dan dapat dikatakan diterima karena model ini sesuai dengan data observasinya. Sebaliknya jika nilai *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test* statistik kurang dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak yang artinya ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga Goodness fit Model tidak baik sehingga model tidak dapat memprediksi nilai observasinya.

3.8.3. Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Untuk menilai model fit, overall model fit dpat diketahui dengan melihat -2 Log likehood. Apabila nilai -2 Log likehood blok number = 0 lebih besar dibandingkan dengan nilai -2 Log likehood block number = 1, menunjukkan model regresi yang lebih baik. Adanya pengurangan dari nilai -2 Log likehood awal (block numer = 0) dengan nilai -2 Log likehood akhir (block number =1) maka dikatakan model fit dengan data (Ghozali, 2016).

3.8.4. Koefisien Determinasi

Uji ini merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R^2 Pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi dengan nilai maksimum kurang

dari 1 (satu) sehingga sulit diinterpretasikan. Ngelkerke's R square merupakan modifikasi dari koefisien *Cox dan Snell* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membagi nilai Cox dan Snell's R^2 dengan nilai maksimumnya. Tujuan dilakukan uji ini adalah untuk mengetahui besar kombinasi variabel independen, serta menjelaskan variabel dependen.

3.8.5. Analisis Regresi Logistik

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik. *Model binary logistic* adalah model regresi yang memiliki variable dependen berupa data kategori, sedangkan independennya berupa data numerik. Data kategori tersebut berupa nilai dummy 1 atau 0.

Menurut Ghozali (2016), *logistic regression* sebetulnya mirip dengan analisis diskriminan yaitu analisisregresi logistik menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independenya. Namun demikian, asumsi multivariate normal distributtion tidak dapat terpenuhi karena variabel bebas merupakan variabel kombinasi antara metric dan non metric. Dalam hal ini dapat dianalisis dengan menggunakan analisis *logistic regression* karena tidak memerlukan asumsi normalitas data dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya.

Model analisis regresi logistik pada penelitian ini yaitu :

$DISC = \alpha + \beta 1\text{AUDIT} + \beta 2\text{DEPEND} + \beta 3\text{Ln}SIZE + e$

Artinya :

DISC = Pengungkapan Laporan Keuangan Situs Web Pemerintah Daerah

α = Konstanta

β = Koefisien

Ln = Logaritma Natural

AUDIT = Opini Audit

DEPEND = Tingkat Ketergantungan Daerah

SIZE = ukuran pemerintah daerah

e = *error*

3.8.6. Uji Hipotesis

Pada regresi logistic digunakan uji wald untuk menguji signifikansi konstanta pada setiap variable independen yang ada dalam model. Pengujian ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Jika nilai probabilitas (sig.) > tingkat signifikan (α), maka hipotesis ditolak. Jika nilai probabilitas (sig.) < tingkat signifikan (α), maka hipotesis diterima. Nilai signifikasi (α) sebesar 5%.

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh opini audit, tingkat ketergantungan daerah dan ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan s*itusweb* pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 pemda . Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang telah ditetapkan, dari 140 populasi diperoleh sampel sebanyak 26 pemerintah daerah kabupaten/kota dengan jumlah tahun pengamatan 4 tahun (2016-2019), maka jumlah keseluruhan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 104 data.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa ketersediaan laporan keuangan selama periode 2016-2019 yang diperoleh dari masing-maisng situsweb pemda Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Pengujian penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini audit, tingkat ketergantungan daerah dan ukuran pemerintah daerah.

Tabel 4.1
Daftar Sampel Penelitian

No.	**Kabupaten/Kota**	**No.**	**Kabupaten/Kota**	**No.**	**Kabupaten/Kota**
1.	Kab. Banyumas	13.	Kab. Pekalongan	25.	Kota Surakarta

2.	Kab. Batang	14.	Kab. Purbalingga	26.	Kota Tegal
3.	Kab. Blora	15.	Kab. Purworejo		
4.	Kab. Boyolali	16.	Kab. Rembang		
5.	Kab. Cilacap	17.	Kab. Semarang		
6.	Kab. Demak	18.	Kab. Sukoharjo		
7.	Kab. Karanganyar	19.	Kab. Tegal		
8.	Kab. Kebumen	20.	Kab. Wonogiri		
9.	Kab. Klaten	21.	Kab. Wonosobo		
10.	Kab. Kudus	22.	Kota Magelang		
11.	Kab. Magelang	23.	Kota Pekalongan		
12.	Kab. Pati	24.	Kota Salatiga		

Sumber : Data Diolah, 2020

4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat keseluruhan sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian dan untuk mengetahui gambaran dari data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari variabel penelitian. Nilai minimum menggambarkan nilai terkecil dari hasil pengolahan sampel. Nilai maksimum menggambarkan nilai terbesar yang berasal dari hasil analisis data. Mean merupakan nilai rata-rata yang menggambarkan jumlah data dibandingkan dengan banyaknya data dari masing-masing variabel. Standar deviasi merupakan hasil pengukuran yang menjelaskan distribusi atau variabilitas yang terdapat pada data yang dianalisis.

Tabel 4.2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DISC	104	0	1	.76	.429
AUDIT	104	3	5	4.87	.504
DEPEND	104	.0505	3.1595	.497945	.2801783
SIZE	104	21.68	30.09	28.7392	1.05380
Valid N (listwise)	104				

Sumber: Output SPSS 23,2020

Berdasarkan Tabel 4.2, maka hasil analisis statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengungkapan Laporan Keuangan Situsweb Pemerintah Daerah

   Hasil uji analisis statistik deskriptif menunjukkan hasil bahwa nilai minimum variabel pengungkapan laporan keuangan situsweb pemda adalah sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1. Nilai rata-rata (mean) variabel pengungkapan laporan keuangan situsweb pemda dari keseluruhan jumlah sampel sebesar 104 adalah sebesar 0,76 pada standar deviasi sebesar 0,429.

   Nilai rata-rata sebesar 0,76 atau 76% menunjukkan bahwa sebagian besar sampel pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menyampaikan laporan keuangan di website resmi mereka. Nilai deviasi standar variabel Pengungkapan Laporan Keuangan Situsweb Pemda lebih kecil dari nilai rata-rata (0,76 < 0,429) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel data tidak bervariasi atau hampir sama.

2. Opini Audit

Hasil uji analisis statistik deskriptif menunjukkan hasil bahwa nilai minimum variabel opini audit adalah sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5. Nilai rata-rata (mean) variabel opini audit dari keseluruhan jumlah sampel sebesar 104 adalah sebesar 4.87 pada standar deviasi sebesar 0.504. Nilai rata-rata sebesar 4.87 menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mendapatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Nilai deviasi standar variabel opini audit lebih kecil dari nilai rata-rata (4.87 < 0.504) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel data tidak bervariasi atau hampir sama.

3. Tingkat Ketergantungan Daerah

Hasil uji analisis statistik deskriptif menunjukkan hasil bahwa nilai minimum variabel opini audit adalah sebesar 0.0505 dan nilai maksimum sebesar 3.1595. Nilai rata-rata (mean) variabel opini audit dari keseluruhan jumlah sampel sebesar 104 adalah sebesar 0.497945 pada standar deviasi sebesar 0.2801783. Nilai rata-rata sebesar 0.497945 menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah termasuk tinggi. Nilai deviasi standar variabel tingkat ketergantungan daerah lebih kecil dari nilai rata-rata (0.497945 < 0.2801783) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel data tidak bervariasi atau hampir sama.

4. Ukuran Pemerintah Daerah

Hasil uji analisis statistik deskriptif menunjukkan hasil bahwa nilai minimum variabel ukuran pemerintah daerah adalah sebesar 21.68 dan

nilai maksimum sebesar 30.90. Nilai rata-rata (mean) variabel ukuran pemerintah daerah dari keseluruhan jumlah sampel sebesar 104 adalah sebesar 28.7392 pada standar deviasi sebesar 1.05380. Nilai rata-rata sebesar 28.7392 menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki total aset yang tinggi. Nilai deviasi standar variabel ukuran pemerintah daerah daerah lebih kecil dari nilai rata-rata (28.7392 < 1.05380) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel data tidak bervariasi atau hampir sama.

4.2.2 Uji *Goodness of Fit*

Kelayakan model regresi dinilai dengan melihat output pada uji *Hosmer* and *Lemeshow's.* Pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis nol (0) bahwa empiris cocok atau sesuai dengan model dan tidak terdapat perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit. Data dapat dikatakan sesuai dengan model apabila nilai Hosmer and Lemeshow > 5% (0,05).

Tabel 4.3
Hasil Uji *Goodness* of Fit

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	3.851	8	.870

Sumber: Output SPSS 23, 2020

Tabel 4.3 menunjukan bahwa nilai *Chi-square* sebesar 3.851 dengan signifikasi sebesar 0,870. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa

model dapat dikatakan fit karena nilai signifikansi lebih besar dari 5% (0,870 > 0,05).

4.2.3 Uji Keseluruhan Model *(Overall Fit Model Test)*

Dalam penelitian ini, untuk menguji *overall fit model test* menggunakan metode uji *likelihood* L. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log *Likelihood* awal (hasil *block number* 0) dengan nilai -2 *Log Likelihood* akhir (hasil block number 1). Model dapat dikatakan baik apabila terjadi penurunan nilai antara -2 Log *Likelihood* awal dengan nilai -2 Log *Likelihood* akhir.

Tabel 4.4
Hasil Uji *Likelihood* L Awal (Block Number 0)

Iteration History[a,b,c]

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients Constant
Step 0	1	114.960	1.038
	2	114.717	1.148
	3	114.717	1.151
	4	114.717	1.151

Sumber: Output SPSS 23, 2020

Tabel 4.5
Hasil Uji *Likelihood* L Akhir (*Block Number* 1)

Iteration History[a,b,c,d]

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients			
			Constant	X1	X2	X3
Step 1	1	106.324	-13.866	.054	.022	.509
	2	104.045	-25.145	.034	.024	.908
	3	102.495	-45.793	-.079	-.019	1.645
	4	102.370	-53.471	-.120	-.046	1.920
	5	102.369	-53.853	-.122	-.049	1.933
	6	102.369	-53.854	-.122	-.049	1.933
	7	102.369	-53.854	-.122	-.049	1.933

Sumber: Output SPSS 23, 2020

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai -2 *Log Likelihood* awal sebesar 114.717. Kemudian setelah dimasukkan keseluruhan variabel yaitu opini audit, tingkat ketergantungan daerah dan ukuran pemerintah daerah, hasil nilai *-2 log likelihood* akhir sebesar 102.369. Terjadi penurunan nilai *-2 log likelihood* sebesar 12.348. Penurunan nilai *-2 log likelihood* ini dapat diartikan bahwa penambahan variabel bebas ke dalam model dapat memberbaiki (*fit)* serta menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan baik dan sudah layak *(fit)* dengan data.

4.2.4 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi pada regresi logistik dapat dilihat pada nilai *Nagellkerke's R Square*. Nilai *Nagellkerke's R Square* dapat

diinterpretasikan seperti nilai *R Square* pada *multipleregression*. Berikut ini hasil uji koefisien determinasinya:

Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	102.369[a]	.112	.168

Sumber: Output SPSS 23, 2020

Berdasarkan Tabel 4.6, besar nilai koefisien determinasi *Nagellkerke's R Square* sebesar 0.168 atau sebesar 16,8% . Nilai tersebut berarti bahwa varaibel ketepatan waktu pelaporan keuangan hanya dijelaskan sebesar 16,8% oleh variabel opini audit, tingkat ketergantungan daerah dan ukuran pemerintah daerah, sedangkan sisanya 83,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model persamaan regresi dalam penelitian.

4.2.5. Analisis Regresi Logistik

Pengujian hipotesis yang digunakan untuk menguji pengaruh opini audit, tingkat ketergantungan daerah dan ukurn pemerintah daerah terhadap pegungkapan laporan keungan situsweb pemerintah daerah pada penelitian ini menggunakan model regresi logistik binary. Berikut ini hasil uji regresi logistik.

Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Logistik

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1[a]	X1	-.122	.470	.067	1	.795	.885
	X2	-.049	1.011	.002	1	.962	.953
	X3	1.933	.835	5.359	1	.021	6.912
	Constant	-53.854	23.494	5.254	1	.022	.000

Sumber: Output SPSS 23, 2020

Berdasarkan Tabel 4.8, diperoleh hasil pengujian pada koefisien regresi sebagai berikut:

$$DISC = \alpha + \beta 1\text{AUDIT} + \beta 2DEPEND + \beta 3\text{Ln}SIZE + e$$

Keterangan:

DISC = Dummy variabel pengungkapan laporan keuangan situsweb pemerintah daerah (kategori 1 untuk pemda yang melaporkan laporan keuangan dan kategori 0 untuk pemda yang tidak melaporkan laporan keuangan).

α = Konstanta

$\beta 1$-$\beta 3$ = Koefisien Regresi

AUDIT = Opini Audit

DEPEND = Tingkat Ketergantungan Daerah

SIZE = Ukuran Pemerintah Daerah

Hasil pengujian pada Tabel 4.8 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Opini Audit (AUDIT)

   Dari Tabel 4.8 dapat diketahui besarnya koefisien regresi jumlah penduduk sebesar -122 dengan nilai *wald* sebesar 0.067 dan nilai signifikansi sebesar 0.795. Nilai koefisien regresi opini audit bernilai negatif berbeda dengan pengajuan teori dimana bernilai positif. Nilai signifikansi variable opini audit lebih besar dari 0,05 (0,795 > 0,05) menunjukkan bahwa bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan situsweb pemda. Dengan demikian, maka H1 ditolak.

2. Tingkat Ketergantungan Daerah (*DEPEND*)

   Dari Tabel 4.8 dapat diketahui besarnya koefisien regresi tingkat ketergantungan daerah sebesar -049 dengan nilai *wald* sebesar 0.002 dan nilai signifikansi sebesar 0.962. Nilai koefisien tingkat ketergantungan daerah bernilai negatif berbeda dengan pengajuan teori yang bernilai positif. Nilai signifikansi variable tingkat ketergantungan daerah lebih besar dari 0,05 (0,962 > 0,05) menunjukkan bahwa bahwa tingkat ketergantungan daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan situsweb pemda. Dengan demikian, maka H2 ditolak.

3. Ukuran Pemerintah Daerah (*SIZE*)

   Dari Tabel 4.8 dapat diketahui besarnya koefisien regresi *SIZE* sebesar 1.933 dengan nilai *wald* sebesar 5.359 dan nilai signifikansi

sebesar 0.021. Nilai signifikansi variable ukuran pemerintah daerah lebih kecil dari 0,05 (0,021 < 0,05) menunjukkan bahwa bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan situsweb pemda. Dengan demikan, H3 diterima

4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data

4.3.1. Pengaruh Opini Audit Terhadap Pengungakapan Laporan Keuangan Situsweb Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji regresi logistik, variabel opini audit ridak berpengaruh terhadap pengungakapan laporan keuangan situsweb pemerintah daerah. Nilai koefisien regresi efektivitas opini audit sebesar -122 dan nilai *wald* sebesar 0.067. Sedangkan nilai signifikansi variabel opini audit sebesar 0.795 atau lebih besar dati tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H1 ditolak atau opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungakapan laporan keuangan situsweb pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa tengah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Idris, Surasni dan Irwan (2018) dan Saraswati, Budiarti dan Sudibyo (2019).

Menurut Idris Surasni dan Irwan (2018) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh pemerintah daerah tidak mendorong pemerintah daerah untuk tidak mempublikasikan laporan keuangan melalui *website* pemerintah daerah. Opini audit selain WTP tidak menunjukkan kinerja

dan akuntabilitas pemerintah daerah itu sendiri buruk karena kinerja pemerintah tidak hanya diukur dengan hasil laporan keuaganya saja.

Seperti yang terjadi dalam beberapa kasus di pemerintah daerah contonya kasus suap pejabat BPK oleh pejabat di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Adanya kasus suap tersebut memperlihatkan kepada masyarakat yang menilai WTP bukan jaminan bebas dari pemerintah daerah dalam melakukan korupsi. Presepsi publik yang mulai berubah membuat opini audit tidak secara langsung mempengaruhi pemerintah daerah dalam menerbitkan laporan keuangan melalui internet (Trisnawati & Ahmad 2014).

4.3.2. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah Terhadap Pengungakapan Laporan Keuangan Situsweb Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji regresi logistik, tingkat ketergantungan daerah tidak berpengaruh terhadap pengungakapan laporan keuangan situsweb pemerintah daerah. Nilai koefisien regresi tingkat ketergantungan daerah sebesar -0,049 dengan nilai *wald* sebesar 0,002. Sedangkan nilai signifikansi variabel tingkat ketergantungan daerah yaitu 0,962 atau lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungakapan laporan keuangan situsweb pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Idris, Surasni dan Irwan (2018).

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien regresi tingkat ketergantungan daerah sebesar -0,049. Dari nilai koefisien tersebut dapat diketahui bahwa tingkat ketergantungan daerah memiliki pengaruh negatif terhadap pengungakapan laporan keuangan situsweb pemerintah daerah. Artinya, Semakin besar tingkat kekayaan pemerintah daerah semakin tinggi skor kinerja pemerintah daerah.

Menurut Idris, Surasni dan Irwan (2018) pemerintah daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana pemerintah pusat dalam hal ini dana alokasi khusus (DAU) tidak akan secara otomatis memiliki presentase yang tinggi dari pengungkapan di situs. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak mempengaruhi pelaporan keuangan di internet diduga karena pemerintah daerah tidak memiliki dorongan untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya (Setyaningrum dan Syafitri, 2012).

4.3.3. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Pengungakapan Laporan Keuangan Situsweb Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji regresi logistik, ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungakapan laporan keuangan situsweb pemerintah daerah. Nilai koefisien regresi tingkat ketergantungan daerah sebesar 1.933 dengan nilai *wald* sebesar 5.359. Sedangkan nilai signifikansi variabel tingkat ketergantungan daerah yaitu 0,021 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap

pengungakapan laporan keuangan situsweb pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Martani, Fitriasari dan Annisa (2014) dan Anggara & Cheisviyanny (2020).

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien regresi tingkat ketergantungan daerah sebesar 1.933. Dari nilai koefisien tersebut dapat diketahui bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap pengungakapan laporan keuangan situsweb pemerintah daerah. Wilopo (2017) Laporan keuangan merupakan salah satu infromasi manajemen kepada principal. Semakin baik kinerja manajemen pemerintah daerah seharusnya semakin baik pula pengungkapan laporan keuanganya. Adapun ukuran pemerintah daerah diukur dengan menggunakan total asset pemda. Aset merupakan salah satu akun dari laporan keuangan yaitu Neraca.

Menurut Nosihana & Yaya (2016) Adanya pengawasan besar maka pemerintah akan cenderung mempublikasikan laporan keuangan melalui internet sesuai Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ. Ukuran pemda yang besar memiliki pengelolaan keuangan yang lebih kompleks, sehingga semakin banyak asimetri informasi keuangan yang harus dilaporkan kepada masyarakat guna mengurangi asimetri informasi. Maka pemerintah diharapkan dapat mengadopsi metode pelaporan infromasi keuangan yang mudah, murah, cepat dan efektif yaitu dengan memanfaatkan internet.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opini audit, tingkat ketergantungan daerah dan ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan situsweb pemerintah daerah kabupaten/kota di Provisi Jawa Tengah. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Opini Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan situsweb pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2019.
2. Tingkat Ketergantungan Dearah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan situsweb pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2019.
3. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan situsweb pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2019.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya dalam rentang waktu 4 tahun

2. Hanya meneliti ketersediaan informasi keuangan pada *situsweb* pemerintah kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah.
3. Variabel independen dalam penelitian ini belum mampu menjelaskan variabel dependen secara lebih luas

5.3. Saran

5.3.1. Saran Bagi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti menyarankan untuk:

1. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan transparansi informasi keuangan daerah melalui IFR sebagaimana telah dinyatakan dalan UU No.14 Tahun 2008 terkait keterbukaan informasi publik dan keluarnya Intruksi Mendagri No.188.52/1797/SJ terkait pedoman pelaporan anggaran serta PP No.71 Tahun 2010.
2. Menigkatkan kualitas layanan dan tampilan website yang lebih update. Pemda harus memastikan bahwa menu yang ditampilkan di laman website dapat diakses dan tidak error terutama terkait menu transparansi anggaran, TPAD dan PPID.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Charoline Cheisviyanny. (2020), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 2, No 1, Seri B, Februari 2020, Hal 2162-2184*.

Handayani, S. (2010), "Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2006", *Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. VII No. 2, pp. 143-154*.

Idris, A. L. M., Surasni, N. K., & Irwan, M. (2018). The Determinant Disclosure of Internet Financial Reporting in District and City Government in Indonesia. *International Journal of Economics and Research*, *9*(1), 62–74.

Istikomah, Mutmainah Kurniawati. (2017). "Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet", *Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo, Volume 12 No.1*.

Ivana, T. T. (2018). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah , Kekayaan Pemerintah Daerah , Jumlah Penduduk dan Opini BPK Terhadap Publikasi LKPD di Website Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.

Laswad, F., Fisher. R., dan Oyelere. P. (2005). Determinants of voluntary internet financial reporting by local government authorities. Journal of Accounting and Public Policy.

Lynda, A., Idris, M., Surasni, N. K., Irwan, M., Ekonomi, F., Mataram, U., & Barat, N. T. (2018). The Determinan Pengungkapan Internet Pelaporan Keuangan Di Kabupaten Dan Kota Pemerintah Di Indonesi. *Indonesia Journal Of Educational Research Vol. 9 No. 1*. 62–74.

Makmum, M. S., & Rahayu, S. (2018). Pengaruh Opini Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2016). *E-Proceeding of Management*, *5*(3), 3508. https://libraryeproceedg.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/.../7233

Martani, D., Fitriasari, D., & Annisa. (2014). Financial and performance transparency on the local government websites in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, *60*(3), 504–516.

Martani, D., Nastiti, D. and Panggah, T.W. (2013), "Disclosure of non-financial information about public service on the official website of local governments in Indonesia", *Journal of Theoretical & Applied Information Technology,*

Vol. 66 No. 1, pp. 500-512.

Murni, A., Rahayu, S., & Zultilisna, D. (2017). Opini Audit, Tingkat Kemandirian, dan Tipe Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, *9*(2), 94–103. http://journal.unpas.ac.id/index.php/jrak/article/view/584

Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites. *Asian Journal of Accounting Research*, *4*(1), 112–128. https://doi.org/10.1108/ajar-06-2019-0043

Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, *3*(2), 89–104. https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.538. (2005). No. 24 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual.

Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 74/PMK.07/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggungjawab Keuangan Negara.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Saraswati, T., Budiarti, L., & Sudibyo, Y. A. (2019). Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet dan Faktor yang Memengaruhinya. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, *3*(1), 85–101. https://doi.org/10.18196/rab.030138

Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, *8*(8), 4759. https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02

Siregar, Syofian. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif : Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta

Verawaty (2015), "Determinat Aksesibilitas Internet Financial Reporting melalui

E-Government Pemerintah Daerah di Indonesia", *Simposium Nasional Akuntansi, Ikatan Akuntan Indonesia KAPD, Medan, 16-19 September*, pp. 1-25.

Wilopo, I. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas &Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, *7*(1), 61. https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).61-78

Yanuaraisya. A. (2016). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Website Pemerintah. *Skripsi.* Universitas Lampung Bandar Lampung

LAMPIRAN

Lampiran 1
Jadwal Penelitian

NO	Bulan	Juli				Agustus				September				Oktober				November			
	Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X		X																	
2	Konsultasi		X	X													X				
3	Revisi Proposal		X	X																	
4	Pendaftaran Semprop								X												
5	Seminar Proposal											X									
6	Pengumpulan Data	X			X										X						
7	Analisis Data														X				X	X	
8	Penulisan Akhir Skripsi														X	X					X
9	Pendaftaran Munaqosah																		X		
10	Munaqosah																			X	
11	Revisi Skripsi																				X

Lampiran 2
Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Banjarnegara	13.	Kab. Kendal	25.	Kab. Sukoharjo
2.	Kab. Banyumas	14.	Kab. Klaten	26.	Kab. Tegal
3.	Kab. Batang	15.	Kab. Kudus	27.	Kab. Temanggung
4.	Kab. Blora	16.	Kab. Magelang	28.	Kab. Wonogiri
5.	Kab. Boyolali	17.	Kab. Pati	29.	Kab. Wonosobo
6.	Kab. Brebes	18.	Kab. Pekalongan	30.	Kota Magelang
7.	Kab. Cilacap	19.	Kab. Pemalang	31.	Kota Pekalongan
8.	Kab. Demak	20.	Kab. Purbalingga	32.	Kota Salatiga
9.	Kab. Grobogan	21.	Kab. Purworejo	33.	Kota Semarang
10.	Kab. Jepara	22.	Kab. Rembang	34.	Kota Surakarta
11.	Kab. Karanganyar	23.	Kab. Semarang	35.	Kota Tegal
12.	Kab. Kebumen	24.	Kab. Sragen		

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/

Lampiran 3
Tabulasi Data

No	Kabupaten / Kota	TAHUN	DISC	AUDIT	DEPEND	SIZE
1	Kabupaten Banyumas	2016	1	5	0,4902	29,27
		2017	1	5	0,4265	29,33
		2018	1	5	0,4207	29,49
		2019	1	5	0,5120	29,46
2	Kabupaten Batang	2016	0	5	0,5277	28,48
		2017	0	5	0,4974	28,51
		2018	0	5	0,4591	21,72
		2019	0	5	0,5662	21,68
3	Kabupaten Blora	2016	1	5	0,1493	28,47
		2017	1	5	0,4602	28,57
		2018	1	5	0,4370	28,70
		2019	0	5	0,5961	28,84
4	Kabupaten Boyolali	2016	0	5	0,5181	28,59
		2017	0	5	0,4662	28,59
		2018	0	5	0,4554	28,77
		2019	0	5	0,5150	28,96
5	Kabupaten Cilacap	2016	0	5	0,1730	29,02
		2017	0	5	0,4435	28,99
		2018	1	5	0,4435	29,16
		2019	1	5	0,5405	29,38
6	Kabupaten Demak	2016	1	5	0,4654	28,84
		2017	1	5	0,4332	29,23
		2018	1	5	0,4173	29,26
		2019	1	5	0,1040	29,33
7	Kabupaten Karanganyar	2016	0	5	0,4950	28,66
		2017	1	5	0,4789	28,70
		2018	1	5	0,4630	28,79
		2019	1	5	0,5599	28,88
8	Kabupaten Kebumen	2016	1	3	0,4820	29,04
		2017	1	5	0,4548	29,11
		2018	1	5	0,4675	29,15
		2019	1	5	0,5172	29,13
9	Kabupaten Klaten	2016	1	3	0,5332	28,88
		2017	1	3	0,4926	28,95

		2018	1	5	0,4802	29,02
		2019	1	5	0,0826	29,06
10	Kabupaten Kudus	2016	1	5	0,4371	28,88
		2017	1	5	0,4073	29,03
		2018	1	5	0,4042	29,06
		2019	1	5	0,4768	29,13
11	Kabupaten Magelang	2016	1	5	0,5299	28,67
		2017	1	5	0,4667	28,74
		2018	1	5	0,4607	28,78
		2019	1	5	0,5079	28,82
12	Kabupaten Pati	2016	1	5	0,4939	29,36
		2017	1	5	0,4284	29,42
		2018	1	5	0,4997	29,45
		2019	1	5	0,6465	29,49
13	Kabupaten Pekalongan	2016	1	5	0,5184	28,40
		2017	1	5	0,4402	28,54
		2018	1	5	0,4355	28,65
		2019	1	5	0,5088	28,74
14	Kabupaten Purbalingga	2016	1	5	0,5139	28,45
		2017	1	5	0,4502	28,51
		2018	1	5	0,4525	28,59
		2019	0	5	0,6405	28,68
15	Kabupaten Purworejo	2016	0	5	0,4547	28,51
		2017	0	5	0,4370	28,58
		2018	1	5	0,4509	28,65
		2019	1	5	0,4797	28,73
16	Kabupaten Rembang	2016	0	3	0,5019	28,22
		2017	1	3	0,4480	28,16
		2018	1	5	0,4320	28,37
		2019	1	5	0,5006	28,39
17	Kabupaten Semarang	2016	1	5	0,4898	28,65
		2017	1	5	0,4458	28,77
		2018	1	5	0,4498	29,11
		2019	0	5	0,5117	29,17
18	Kabupaten Sukoharjo	2016	0	5	0,4969	29,04
		2017	1	5	0,4410	29,14
		2018	1	5	3,1595	29,19
		2019	1	5	0,5416	29,28
19	Kabupaten Tegal	2016	0	5	0,5377	28,66

		2017	1	5	0,4658	28,73
		2018	1	5	0,4534	28,79
		2019	1	5	0,4973	28,85
20	Kabupaten Wonogiri	2016	0	5	0,5629	28,73
		2017	1	5	0,4855	28,79
		2018	1	5	0,4894	28,87
		2019	1	5	0,6084	28,95
21	Kabupaten Wonosobo	2016	0	5	0,5340	28,51
		2017	1	5	0,4519	28,62
		2018	1	5	0,4471	28,75
		2019	1	5	0,5579	28,85
22	Kota Magelang	2016	1	5	0,5332	28,70
		2017	1	5	0,4838	28,91
		2018	1	5	0,4846	28,98
		2019	1	5	0,5670	29,02
23	Kota Pekalongan	2016	1	5	0,5223	28,41
		2017	1	5	0,4903	28,47
		2018	1	5	0,4961	28,53
		2019	1	5	0,6398	28,68
24	Kota Salatiga	2016	0	5	0,5184	28,34
		2017	0	5	0,5076	28,74
		2018	1	5	0,5035	29,42
		2019	1	5	0,0505	29,44
25	Kota Surakarta	2016	0	5	0,4941	29,54
		2017	1	5	0,4583	29,64
		2018	1	5	0,4399	29,68
		2019	1	5	0,548	30,09
26	Kota Tegal	2016	0	3	0,4669	28,36
		2017	1	3	0,4705	28,45
		2018	1	5	0,4884	28,51
		2019	1	5	0,5474	28,51

Lampiran 5
Hasil Uji Regresi Logistik

Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DISC	104	0	1	.76	.429
AUDIT	104	3	5	4.87	.504
DEPEND	104	.0505	3.1595	.497945	.2801783
SIZE	104	21.68	30.09	28.7392	1.05380
Valid N (listwise)	104				

Hasil Uji *Goodness of Fit*

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	3.851	8	.870

2 *Log Likehihood* Awal *(Block Number 0*

Iteration History[a,b,c]

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients Constant
Step 0	1	114.960	1.038
	2	114.717	1.148
	3	114.717	1.151
	4	114.717	1.151

-2 Log Likelohood Akhir *(Block Number 1)*

Iteration History[a,b,c,d]

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients			
			Constant	X1	X2	X3
Step 1	1	106.324	-13.866	.054	.022	.509
	2	104.045	-25.145	.034	.024	.908
	3	102.495	-45.793	-.079	-.019	1.645
	4	102.370	-53.471	-.120	-.046	1.920
	5	102.369	-53.853	-.122	-.049	1.933
	6	102.369	-53.854	-.122	-.049	1.933
	7	102.369	-53.854	-.122	-.049	1.933

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	102.369[a]	.112	.168

Tabel Uji Ketepatan Model

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	12.347	3	.006
	Block	12.347	3	.006
	Model	12.347	3	.006

Hasil Uji Regresi Logistik

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1[a]	X1	-.122	.470	.067	1	.795	.885
	X2	-.049	1.011	.002	1	.962	.953
	X3	1.933	.835	5.359	1	.021	6.912
	Constant	-53.854	23.494	5.254	1	.022	.000

Lampiran 6
Daftar Riwayat Hidup

A Riwayat hidup

Nama	:	Sherly Aprina Lovika
TTL	:	Surakarta, 26 Maret 1999
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
No HP	:	085606497377
E-mail	:	Sherlyaprina99@gmail.com
Alamat	:	Minapadi RT 01/RW 09 Nusukan, Banjarsari, Surakarta

B Riwayat Pendidikan

2014-2010	:	SD Negeri 157 Tegalmulyo Surakarta
2010-2013	:	SMP Muhammadiyah 2 Surakarta
2013-2016	:	MA Negeri 2 Surakarta
2016-2020	:	IAIN Surakarta – S1 Akuntansi Syariah

C Riwayat Organisasi

IPM Muh 2 Surakarta (2012-2013)	:	Bendahara
OSIS Muh 2 Surakarta (2012-2013)	:	Sekertaris
Dewan Ambalan Hizbul Wathan (2012-2013)	:	Pembina
Teater Sirat IAIN Surakarta (2016-2020)	:	Anggota

D Prestasi

2018	:	Finalis Pekan Teater Nasional 2018
2019	:	Juara 1 Festival Teater Jawa Tengah 2019

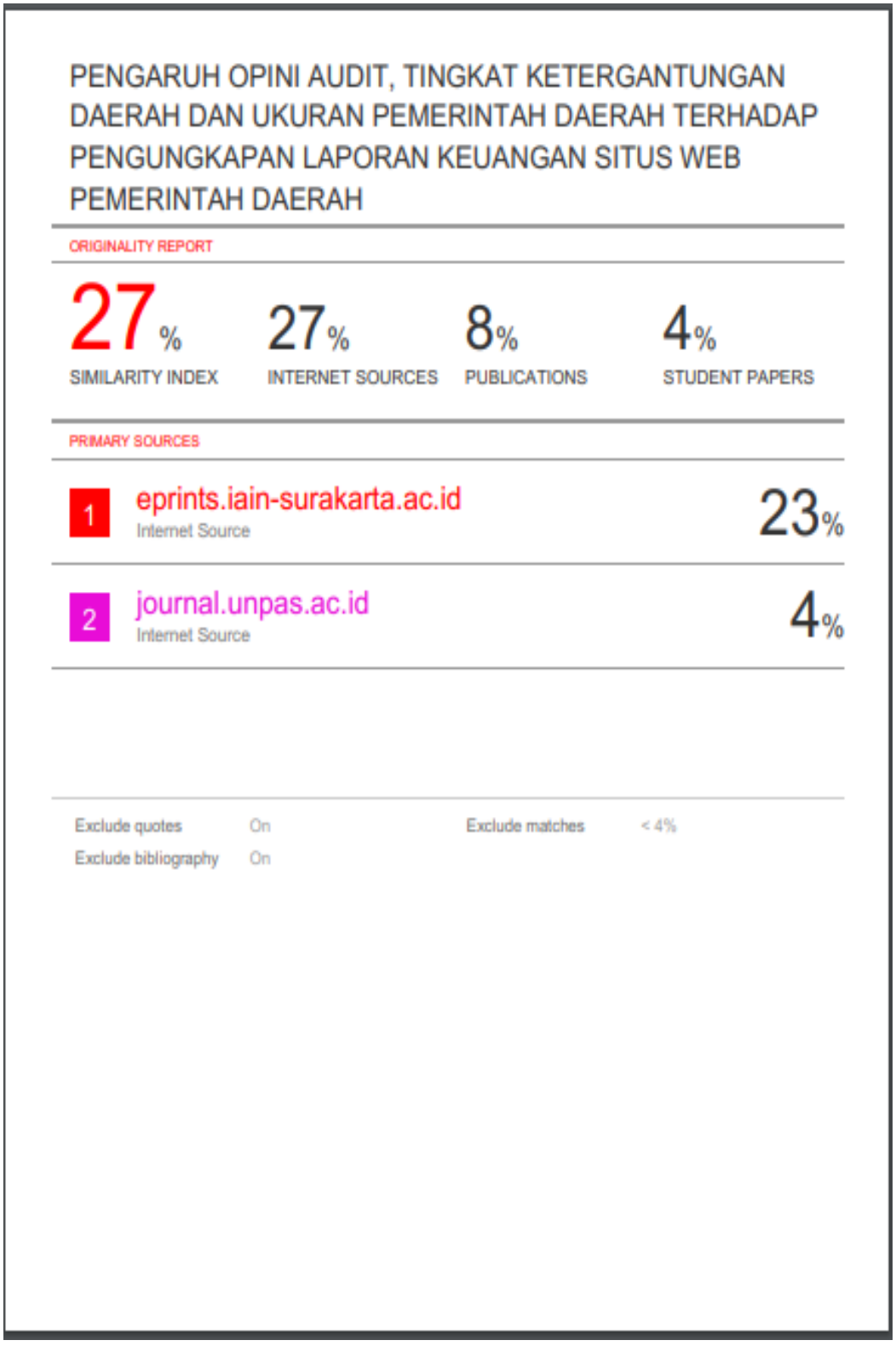

PENGARUH OPINI AUDIT, TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH

ORIGINALITY REPORT

27%	27%	8%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	23%
2	journal.unpas.ac.id Internet Source	4%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 4%
Exclude bibliography	On		